

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan standardisasi nasional pendidikan yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan, standar kelulusan yang semakin meningkat, pengawasan penyelenggaraan/pengelolaan lembaga pendidikan yang semakin intensif, seperti adanya akreditasi dan persyaratan guru yang semakin tinggi.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan peran guru sangat penting. Hal ini dapat dilihat adanya regulasi yang berkaitan dengan guru. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan jabatan profesional yang menuntut agar guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, menyebutkan bahwa guru harus berpendidikan minimal S1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 6 yang menyatakan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka FKIP-UMS sebagai LPTK pencetak guru ikut bertanggungjawab untuk mengawal amanah UU tersebut.

Pelaksanaan PPL yang diselenggarakan FKIP-UMS sampai saat ini kurang efektif. Hal ini disebabkan rasio sekolah mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan PPL dengan

mahasiswa peserta PPL kurang ideal. Rata-rata setiap sekolah mitra membina 30-35 mahasiswa non PGSD dan PGPAUD, sedangkan mahasiswa PGSD dan PGPAUD antara 10-12 mahasiswa setiap sekolah mitra. Akibatnya frekuensi praktek mengajar dan pembimbingan mahasiswa PPL dirasakan masih kurang maksimal.

Rasio dosen pembimbing lapangan dengan mahasiswa peserta PPL juga masih kurang ideal. Di mana untuk tahun akademik 2011/2012 rasio dosen mahasiswa PPL untuk PGSD satu dosen membimbing 20/24 mahasiswa. Di samping itu dosen di kampus tidak saja mengajar tetapi juga membimbing skripsi dan tugas tri darma perguruan tinggi yang lain, sehingga pelaksanaan pembimbingan PPL kurang maksimal, artinya belum terlibat dalam proses perencanaan, pembimbingan mengajar dan penilain uji kompetensi belum maksimal.

Pelaksanaan pembimbingan mahasiswa dalam PPL selama ini didominasi oleh guru pamong, akibatnya peran dosen pembimbing lapangan (DPL) masih kurang. Disamping itu, berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar dari guru pamong belum memenuhi sebagai guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Guru pamong dalam pelaksanaan pembelajaran masih banyak menggunakan pendekatan yang konvensional. Padahal tuntutan ke depan pembelajaran harus menggunakan pembelajaran tematik integratif (Depdiknas 2013) yang aktif dan inovatif.

Pembekalan yang diterima mahasiswa sebelum terjun di sekolah masih belum memadai. Pembekalan yang diberikan lebih banyak berkaitan dengan proses pembelajaran, sementara tugas profesional harus didukung dengan berbagai ilmu pengetahuan, seperti psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Materi-materi tersebut sebenarnya sudah diberikan kepada mahasiswa, tetapi perlu refresing mendekati pelaksanaan PPL.

Pembelajaran mikro yang berbasis pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran aktif (*active learning*) bagi mahasiswa PGSD akan berdampak pada tingginya tingkat kebermaknaan belajar dan ketuntasan belajar (*mastery learning*). Dari sinilah akhirnya penguasaan kompetensi calon guru SD akan meningkat. Kompetensi profesional pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran aktif yang memadai

memudahkan calon guru SD dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai guru. Oleh karena itu, pembelajaran mikro bagi mahasiswa PGSD lebih dititik beratkan pembelajaran tematik.

Untuk mencapai tujuan dan *outcomes* sebagaimana dikemukakan di atas, program pengalaman lapangan (PPL) perlu dikelola dengan baik. Thesis ini akan mendeskripsikan pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang selama ini dilakukan, dan bagaimana model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang sebaiknya dilakukan agar tujuan program studi PGSD FKIP-UMS menghasilkan guru profesional dapat tercapai.

Dalam rangka menghasilkan guru yang profesional tersebut FKIP-UMS harus berbenah diri. Salah satu aspek yang harus dibenahi agar menghasilkan guru yang profesional adalah pemberian bekal pengalaman mengajar yang optimal sebelum mahasiswa terjun di masyarakat, mengamalkan ilmunya sebagai guru. Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP – UMS untuk mencapai derajat gelar sarjana pendidikan.

Program pengalaman lapangan akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal perlu pengelolaan yang baik, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Program S1 PGSD merupakan program baru, karena sebelumnya untuk menjadi guru SD cukup luasan SLTA (SPG), Lahirnya UU No. 14 tahun 2005 mensyaratkan untuk menjadi guru SD harus minimal S1/D4. Program studi PGSD FKIP-UMS mulai dibuka tahun 2007, artinya pelaksanaan PPL bagi program studi PGSD baru dilaksanakan tiga angkatan. Setiap diadakan evaluasi pelaksanaan PPL banyak sekali masukan baik dari guru pamong, dosen pembimbing maupun mahasiswa untuk perbaikan pengelolaan PPL. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan PPL PGSD FKIP-UMS seharusnya dilaksanakan.

Tujuan dilaksanakan PPL adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan demikian, mahasiswa FKIP – UMS diharapkan menjadi guru yang profesional.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS?
2. Bagaimana model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang sesuai dengan tuntutan kompetensi?
3. Bagaimana kebijakan yang seharusnya dilakukan FKIP agar model pengelolaan sesuai dengan kebutuhan *stake holder*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ada tiga:

1. Mendeskripsikan pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang dilakukan selama ini.
2. Merumuskan model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang sesuai dengan tuntutan kompetensi.
3. Mendeskripsikan kebijakan yang sebaiknya dilakukan agar pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS sesuai dengan kebutuhan *stake holder*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara teoritis menambah pengetahuan tentang prinsip-prinsip penelolaan PPL dan secara prktis dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pengelolaan PPL khususnya PGSD FKIP-UMS dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan lainnya.